

Narasi Gender dan Kekuasaan dalam Fenomena Poligami di Media Sosial: Kajian Sosio-Digital di Indonesia

**Ahmad Mario Maulana¹, Ahmad Gyas Pawaj², Muhamad Farid Alfurqon³,
Agung Wiguna⁴, Dea Lestari⁵, M Dani Herlambang⁶, M Al Fikri Najiullah⁷, Aziz
Faturokhman⁸**

12345678Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

231110069.ahmad@uinbanten.ac.id, 231110071.ahmad@uinbanten.ac.id,
231110070.muhamad@uinbanten.ac.id, 231110072.agung@uinbanten.ac.id,
231110073.dea@uinbanten.ac.id, 231110074.muhammad@uinbanten.ac.id,
aziz.faturokhman@uinbanten.ac.id

Author' correspondence: gyfspwz@gmail.com

Abstract. The circulation of polygamy narratives on Indonesian social media reflects an ongoing negotiation of gender relations and symbolic power in the digital public sphere. Situated within a socio-digital and critical gender perspective, this research examines how polygamy is constructed, legitimized, and contested across TikTok, Instagram, and YouTube through qualitative content and semiotic analysis of posts, comments, and user interactions. The findings reveal a dual pattern of discourse. On one side, dominant narratives normalize polygamy by framing male authority as moral, religiously grounded, and economically responsible, thereby reinforcing hierarchical gender relations and the symbolic legitimacy of masculine leadership within the household. On the other side, counter-narratives emerge through personal testimonies, critical reflections, and interactive debates that question claims of justice, highlight emotional and structural inequalities, and promote gender equity. The interactional features of digital platforms—such as comment threads, video responses, and algorithmic amplification—intensify both normalization and resistance, turning social media into a contested arena of meaning production. These dynamics demonstrate that digital discourse not only reflects existing cultural and religious values but actively reshapes public perception of polygamy. The analysis contributes to socio-digital studies by showing how gendered power relations are reproduced and challenged simultaneously within Indonesia's contemporary media ecology.

Keywords: Polygamy, Social Media, Gender, Power, Socio-Digital Studies, Indonesia

Abstrak. Peredaran narasi poligami di media sosial Indonesia menunjukkan proses negosiasi relasi gender dan kekuasaan simbolik dalam ruang publik digital. Berangkat dari perspektif sosio-digital dan kajian gender kritis, penelitian ini menelaah bagaimana poligami dikonstruksi, dilegitimasi, dan diperdebatkan di platform TikTok, Instagram, dan YouTube melalui analisis konten dan semiotika terhadap ungkahan, komentar, serta interaksi pengguna. Hasil analisis memperlihatkan pola diskursus yang bersifat ganda. Di satu sisi, narasi dominan menormalisasi poligami dengan membingkai otoritas laki-laki sebagai kepemimpinan moral, religius, dan bertanggung jawab secara ekonomi, sehingga memperkuat hierarki gender dalam relasi rumah tangga. Di sisi lain, muncul narasi tandingan melalui testimoni personal, refleksi kritis, dan perdebatan daring yang mempertanyakan klaim keadilan serta menyoroti ketimpangan emosional dan struktural yang dialami perempuan. Fitur interaktif media sosial, seperti kolom komentar, respons video, dan logika algoritmik, memperkuat sekaligus mempertentangkan kedua arus narasi tersebut. Dinamika ini menunjukkan bahwa media sosial tidak

*Ahmad Gyas Pawaj, gyfspwz@gmail.com

hanya merefleksikan nilai budaya dan agama yang telah ada, tetapi juga secara aktif membentuk persepsi publik terhadap praktik poligami. Temuan ini memperkaya kajian sosio-digital dengan menegaskan bahwa relasi kuasa berbasis gender direproduksi dan digugat secara simultan dalam ekosistem media kontemporer Indonesia.

Kata Kunci: Poligami, Media Sosial, Gender, Kekuasaan, Kajian Sosio-Digital, Indonesia

PENDAHULUAN

Fenomena poligami di Indonesia merupakan isu sosial yang terus mengalami transformasi makna seiring perkembangan media digital. Praktik yang sebelumnya lebih banyak diperdebatkan dalam ruang keagamaan dan hukum kini hadir secara terbuka di media sosial melalui berbagai format konten yang mudah diakses publik. Media sosial tidak lagi sekadar medium distribusi informasi, melainkan ruang produksi makna yang memungkinkan individu membangun legitimasi sosial atas praktik tertentu (Castells, 2010). Dalam konteks ini, poligami menjadi bagian dari diskursus publik yang dipengaruhi oleh logika algoritma, visualitas, serta partisipasi audiens. Transformasi ini menuntut pembacaan baru yang tidak hanya melihat poligami sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai konstruksi digital yang sarat relasi kuasa.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa representasi poligami di media cenderung menampilkan pembingkaian normatif berbasis agama atau moralitas (Hadi, 2022; Yazid, 2020). Beberapa penelitian lain menyoroti aspek wacana kritis dan resistensi terhadap poligami dalam komunitas digital (Wahyuni, 2021). Namun, masih terbatas penelitian yang secara spesifik menganalisis bagaimana narasi gender dan kekuasaan dikonstruksi melalui interaksi simbolik di berbagai platform media sosial secara komparatif. Kesenjangan ini penting diperhatikan karena setiap platform memiliki karakteristik komunikasi yang berbeda, yang berpotensi memengaruhi pola representasi dan negosiasi makna. Oleh karena itu, pendekatan sosio-digital diperlukan untuk memahami dinamika tersebut secara lebih komprehensif.

Dalam perspektif teori gender, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam praktik poligami tidak dapat dilepaskan dari struktur patriarki yang mengatur distribusi kekuasaan dalam rumah tangga (Connell, 2005). Media sosial sebagai ruang publik digital memungkinkan struktur tersebut direproduksi sekaligus

dipertanyakan melalui representasi visual, bahasa normatif, dan interaksi daring. Diskursus yang berkembang sering kali menampilkan legitimasi maskulinitas sebagai otoritas moral dan religius, sementara posisi perempuan ditempatkan dalam kerangka penerimaan dan adaptasi. Namun, ruang digital juga memunculkan narasi tandingan yang mengedepankan keadilan gender dan pengalaman perempuan sebagai bentuk resistensi simbolik. Dengan demikian, analisis terhadap diskursus poligami digital perlu mempertimbangkan dimensi representasi, legitimasi, dan kontestasi makna secara simultan.

Perkembangan teknologi komunikasi telah menciptakan ruang publik digital yang bersifat partisipatif dan dialogis (Habermas, 1989; Papacharissi, 2010). Dalam ruang ini, produksi dan konsumsi wacana berlangsung secara interaktif, sehingga makna tidak lagi sepenuhnya dikontrol oleh institusi formal. Diskursus poligami di media sosial memperlihatkan bagaimana otoritas moral, pengalaman personal, dan argumen normatif saling berhadapan dalam proses negosiasi makna. Karakteristik algoritmik platform turut membentuk visibilitas konten dan memengaruhi distribusi wacana yang dominan. Situasi ini menunjukkan bahwa relasi gender dalam praktik poligami tidak hanya dibentuk oleh struktur sosial offline, tetapi juga oleh dinamika komunikasi digital.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menempatkan poligami sebagai praktik sosial yang dikonstruksi dan diperdebatkan dalam ruang publik digital Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada representasi gender, legitimasi otoritas laki-laki, serta kemunculan narasi tandingan dalam interaksi pengguna di TikTok, Instagram, dan YouTube. Dengan menggunakan pendekatan sosio-digital dan analisis semiotika, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian terkait dinamika kekuasaan berbasis gender dalam diskursus poligami lintas platform. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif interdisipliner antara studi gender dan komunikasi digital, serta penyediaan kerangka analitis untuk memahami bagaimana media sosial membentuk persepsi publik terhadap praktik poligami di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka sosio-digital yang menempatkan media sosial sebagai ruang produksi dan negosiasi makna (Papacharissi, 2010). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap simbol, bahasa, dan interaksi yang membentuk representasi gender dan kekuasaan. Unit analisis penelitian berupa konten unggahan, video, caption, serta komentar pengguna yang membahas praktik poligami di TikTok, Instagram, dan YouTube. Data dikumpulkan selama periode Januari–Juni 2025 untuk memastikan relevansi dan keterbaruan fenomena yang dianalisis. Pemilihan periode tersebut mempertimbangkan intensitas diskursus poligami yang meningkat dalam kurun waktu tersebut.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) konten yang secara eksplisit membahas poligami; (2) memiliki interaksi publik yang signifikan; dan (3) memuat narasi terkait relasi gender atau legitimasi otoritas. Sebanyak 60 konten terpilih dianalisis secara mendalam, terdiri atas 20 konten dari masing-masing platform. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital, dokumentasi tangkapan layar, dan pencatatan sistematis terhadap pola interaksi. Analisis data menggunakan kombinasi analisis konten dan semiotika untuk mengidentifikasi tema, simbol, serta konstruksi makna yang muncul (Krippendorff, 2018). Tahapan analisis meliputi proses coding terbuka, kategorisasi tematik, dan interpretasi berdasarkan kerangka teori gender dan kekuasaan.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan pola narasi antarplatform serta konsistensi tema dalam berbagai jenis konten. Proses audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan langkah analisis secara sistematis sehingga memungkinkan penelusuran ulang oleh peneliti lain. Refleksivitas peneliti juga diperhatikan dengan menghindari generalisasi normatif dan menjaga pemisahan antara interpretasi dan data empiris. Batasan penelitian terletak pada fokus analisis konten publik tanpa melibatkan wawancara langsung dengan pembuat konten atau audiens. Meskipun demikian, pendekatan ini memadai untuk mengungkap pola representasi dan dinamika kekuasaan berbasis gender dalam diskursus poligami digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi dan Pola Narasi Poligami dalam Konten Media Sosial sebagai Representasi Praktik Sosial di Indonesia

Fenomena poligami yang tampil dalam konten media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya hadir sebagai realitas sosial, tetapi juga sebagai konstruksi naratif yang dibentuk, diproduksi, dan disirkulasikan secara intensif di ruang digital. Media sosial menjadi medium utama dalam membingkai poligami sebagai wacana publik, di mana pengalaman personal, pandangan keagamaan, nilai budaya, serta kepentingan ideologis bertemu dan saling berinteraksi. Narasi yang muncul tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan makna simbolik yang merepresentasikan relasi kuasa, legitimasi sosial, dan posisi gender dalam masyarakat Indonesia.

Konten poligami di media sosial umumnya dikemas dalam bentuk video pendek, testimoni, potongan ceramah, vlog keluarga, hingga diskusi interaktif melalui kolom komentar. Dalam banyak kasus, poligami direpresentasikan sebagai praktik yang wajar, sah, dan bahkan ideal, terutama ketika dikaitkan dengan narasi religius dan moral. Pola ini terlihat dari penggunaan bahasa yang menekankan kepatuhan terhadap ajaran agama, pengorbanan perempuan, serta kepemimpinan laki-laki sebagai kepala keluarga. Melalui narasi semacam ini, poligami diposisikan bukan sekadar pilihan personal, melainkan sebagai bentuk ketaatan dan solusi sosial terhadap berbagai persoalan rumah tangga.¹

Selain itu, konstruksi narasi poligami di media sosial juga sering menampilkan visualisasi kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Representasi ini berfungsi sebagai strategi simbolik untuk menormalisasi poligami dan membangun citra positif di hadapan publik. Kehidupan istri-istri yang ditampilkan sebagai rukun, saling mendukung, dan patuh terhadap suami menjadi gambaran dominan yang berulang. Pola narasi semacam ini mengaburkan kompleksitas relasi emosional dan struktural dalam praktik poligami, sekaligus

¹ Nila Suryandari & Rina Yuliastina, “Komunikasi Perempuan dalam Keluarga Berpoligami di Madura,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 1 (2025), 22–35.

menghilangkan potensi konflik, ketimpangan, dan tekanan psikologis yang mungkin dialami oleh perempuan.

Di sisi lain, media sosial juga memfasilitasi munculnya narasi poligami yang bersifat defensif dan apologetik. Konten semacam ini biasanya hadir sebagai respons terhadap kritik publik, terutama dari kelompok yang menolak poligami atas dasar keadilan gender dan hak perempuan. Narasi defensif ini berupaya menegaskan bahwa penolakan terhadap poligami dianggap sebagai bentuk ketidaktahuan, ketidakpatuhan terhadap nilai agama, atau pengaruh budaya Barat. Dengan demikian, terjadi proses pembingkaian oposisi yang menempatkan pendukung poligami sebagai pihak yang benar dan bermoral, sementara penentangnya diposisikan sebagai pihak yang menyimpang.

Pola narasi lain yang cukup menonjol adalah personalisasi pengalaman poligami melalui kisah individu. Testimoni istri, baik istri pertama maupun istri berikutnya, sering dijadikan alat legitimasi sosial. Kisah penerimaan, keikhlasan, dan kebahagiaan yang ditampilkan secara publik berfungsi sebagai pemberian moral sekaligus tekanan simbolik bagi perempuan lain agar mengikuti sikap serupa. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai ruang performatif di mana identitas dan pengalaman perempuan dibentuk sesuai dengan ekspektasi sosial yang dominan.

Namun demikian, konstruksi narasi poligami di media sosial tidak bersifat tunggal. Di tengah dominasi narasi normatif dan legitimatif, muncul pula konten yang bersifat kritis dan reflektif. Narasi tandingan ini biasanya diusung oleh aktivis perempuan, akademisi, atau pengguna media sosial yang memiliki pengalaman traumatis terkait poligami. Konten tersebut menyoroti ketimpangan relasi kuasa, dampak psikologis terhadap perempuan dan anak, serta ketidakadilan struktural yang tersembunyi di balik wacana keagamaan dan budaya. Kehadiran narasi kritis ini menunjukkan bahwa media sosial juga menjadi ruang perlawanan simbolik terhadap praktik sosial yang mapan.

Interaksi pengguna dalam kolom komentar memperlihatkan bagaimana makna poligami dinegosiasikan secara kolektif. Perdebatan yang terjadi mencerminkan polarisasi pandangan masyarakat, antara mereka yang memandang

poligami sebagai hak dan solusi, dan mereka yang melihatnya sebagai bentuk ketidakadilan gender. Kolom komentar menjadi arena di mana otoritas moral, pengetahuan agama, dan pengalaman personal dipertarungkan. Dalam proses ini, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh pembuat konten, tetapi juga oleh audiens yang aktif membentuk, memperkuat, atau menantang narasi yang ada.

Konstruksi narasi poligami di media sosial juga tidak dapat dilepaskan dari logika algoritma platform digital. Konten yang bersifat sensasional, kontroversial, dan emosional cenderung mendapatkan perhatian lebih luas dan tersebar lebih cepat. Hal ini mendorong pembuat konten untuk menyederhanakan narasi poligami ke dalam dikotomi benar-salah atau halal-haram, sehingga mengurangi ruang untuk diskusi yang lebih mendalam dan kontekstual. Akibatnya, praktik poligami direpresentasikan secara dangkal dan normatif, tanpa mengungkap kompleksitas sosial yang melingkupinya.²

Dalam konteks sosial Indonesia, narasi poligami di media sosial merefleksikan ketegangan antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Di satu sisi, poligami dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan religius. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran gender dan akses informasi global mendorong munculnya kritik terhadap praktik tersebut. Media sosial menjadi ruang pertemuan antara kedua arus ini, di mana praktik sosial lama dinegosiasikan ulang dalam kerangka nilai-nilai kontemporer.

Secara keseluruhan, konstruksi dan pola narasi poligami dalam konten media sosial menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya hidup dalam ranah privat, tetapi juga dibentuk dan direproduksi dalam ruang publik digital. Narasi yang beredar merepresentasikan relasi kekuasaan, norma gender, serta upaya legitimasi sosial yang kompleks. Media sosial tidak sekadar mencerminkan realitas poligami di Indonesia, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk persepsi, sikap, dan penerimaan masyarakat terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, poligami di

² Farah Zahra, Representasi Poligami dalam Video Dokumenter VICE Indonesia, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1) (2023), 78–90.

media sosial dapat dipahami sebagai representasi praktik sosial yang terus dinegosiasikan melalui bahasa, simbol, dan interaksi digital.

Representasi Relasi Gender dan Kekuasaan dalam Diskursus Poligami Digital pada Platform TikTok, Instagram, dan YouTube

Diskursus poligami yang berkembang di platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memperlihatkan bagaimana relasi gender dan kekuasaan direpresentasikan, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam ruang publik digital. Ketiga platform ini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan atau sarana berbagi informasi, tetapi juga sebagai arena ideologis tempat nilai-nilai sosial, norma gender, dan struktur kekuasaan diproduksi dan direproduksi melalui berbagai bentuk konten. Dalam konteks poligami, media sosial menjadi medium strategis untuk membangun legitimasi, memperkuat dominasi, sekaligus membuka ruang bagi resistensi terhadap praktik tersebut.

Representasi relasi gender dalam diskursus poligami digital umumnya menempatkan laki-laki sebagai aktor utama yang memiliki otoritas moral, religius, dan sosial. Dalam banyak konten, laki-laki digambarkan sebagai pemimpin keluarga yang memiliki hak untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk berpoligami. Posisi ini diperkuat melalui narasi kepemimpinan, tanggung jawab ekonomi, dan kemampuan mengelola rumah tangga secara adil. Kekuasaan laki-laki tidak selalu ditampilkan secara eksplisit, melainkan disamarkan melalui bahasa normatif yang menekankan peran kodrat dan kewajiban sosial, sehingga tampak alamiah dan sulit dipersoalkan.³

Sementara itu, perempuan dalam diskursus poligami digital sering direpresentasikan dalam posisi subordinat dan adaptif. Istri pertama maupun istri berikutnya kerap ditampilkan sebagai sosok yang sabar, ikhlas, dan menerima keputusan suami sebagai bentuk pengabdian. Konten yang menonjolkan keikhlasan perempuan berfungsi sebagai mekanisme simbolik untuk menormalkan ketimpangan relasi kuasa. Dalam banyak kasus, suara perempuan dibatasi pada

³ Muhammad Yazid, “Indonesian YouTube Preachers’ Legal Opinion on Polygamy,” *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1 (2020), 45–60.

narasi yang telah disesuaikan dengan ekspektasi sosial, sehingga pengalaman emosional, konflik batin, dan ketidaksetaraan struktural tidak memperoleh ruang yang memadai.

Platform TikTok, dengan karakter video pendek dan format yang cepat, cenderung menyederhanakan diskursus poligami ke dalam pesan-pesan singkat yang emosional dan persuasif. Konten poligami di TikTok sering menampilkan potongan ceramah, kutipan normatif, atau adegan keluarga yang tampak harmonis. Representasi ini memperkuat hierarki gender dengan cara yang halus namun efektif, karena pesan disampaikan secara repetitif dan mudah dikonsumsi. Algoritma TikTok yang mendorong viralitas juga berkontribusi pada penguatan narasi dominan, sementara suara kritis sering kali tenggelam dalam arus konten populer.

Instagram menghadirkan representasi poligami melalui visual yang lebih terkuras dan estetis. Foto keluarga, unggahan kebersamaan, dan caption yang menekankan kebahagiaan dan keberkahan menjadi sarana untuk membangun citra ideal poligami. Dalam konteks ini, kekuasaan diwujudkan melalui kontrol atas representasi visual, di mana realitas yang kompleks disederhanakan menjadi simbol keharmonisan. Perempuan ditampilkan sebagai bagian dari narasi estetika tersebut, sering kali tanpa ruang untuk menunjukkan kerentanan atau ketidakadilan yang mungkin dialami.

YouTube, sebagai platform dengan durasi konten yang lebih panjang, memungkinkan diskursus poligami disajikan secara lebih naratif dan argumentatif. Video diskusi, podcast, dan vlog keluarga poligami memberikan ruang untuk membangun legitimasi yang lebih sistematis. Namun demikian, relasi kekuasaan tetap tampak dalam struktur narasi, di mana laki-laki sering berperan sebagai narator utama atau figur otoritatif. Perempuan yang berbicara dalam konten tersebut umumnya berada dalam kerangka persetujuan dan pemberian, sehingga suara kritis tetap menjadi minoritas.

Meskipun dominasi narasi patriarkal cukup kuat, diskursus poligami digital juga memperlihatkan adanya perlawanan dan negosiasi makna. Perempuan dan

kelompok pendukung keadilan gender memanfaatkan media sosial untuk mengungkap pengalaman personal yang penuh luka, ketimpangan emosional, dan dampak psikologis poligami. Konten semacam ini menantang representasi arus utama dan membuka ruang diskusi yang lebih kritis mengenai relasi kuasa dalam rumah tangga. Melalui komentar, duet video, dan respons konten, terjadi pertarungan simbolik antara narasi dominan dan narasi tandingan.

Kolom komentar di ketiga platform menjadi ruang penting dalam memperlihatkan dinamika kekuasaan yang cair dan partisipatif. Pengguna tidak hanya mengonsumsi konten, tetapi juga aktif memproduksi makna melalui dukungan, kritik, dan perdebatan. Di ruang ini, otoritas moral sering diperebutkan, baik melalui argumen normatif, pengalaman pribadi, maupun klaim pengetahuan tertentu. Interaksi ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam diskursus digital tidak bersifat absolut, melainkan terus dinegosiasikan oleh berbagai aktor sosial.⁴

Secara keseluruhan, representasi relasi gender dan kekuasaan dalam diskursus poligami digital di TikTok, Instagram, dan YouTube mencerminkan struktur sosial yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia. Media sosial berfungsi sebagai ruang di mana dominasi patriarkal direproduksi, tetapi juga sebagai arena di mana resistensi dan kesadaran kritis dapat tumbuh. Diskursus poligami digital memperlihatkan bahwa relasi gender tidak hanya dibentuk oleh praktik sosial di dunia nyata, tetapi juga oleh representasi, bahasa, dan interaksi yang berlangsung di ruang digital. Melalui proses ini, media sosial memainkan peran signifikan dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang kekuasaan, legitimasi, dan keadilan gender dalam konteks poligami.

Dominasi Maskulinitas, Legitimasi Otoritas Laki-Laki, dan Pembentukan Hierarki Gender dalam Narasi Poligami di Media Sosial

Narasi poligami yang beredar di media sosial memperlihatkan secara jelas bagaimana dominasi maskulinitas dan legitimasi otoritas laki-laki dibangun, dipertahankan, dan dinormalisasi dalam ruang digital. Media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebarluasan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai arena simbolik

⁴ Titi Satri Wahyuni & Zumiarti, Analisis Wacana Kritis pada Komunitas Indonesia Tanpa Poligami (ITAMI) di Instagram, *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2) (2021), 65–71.

tempat identitas maskulin dan struktur hierarki gender diproduksi ulang. Dalam konteks ini, poligami direpresentasikan bukan sekadar sebagai praktik relasional dalam rumah tangga, melainkan sebagai penegasan posisi laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan pengambil keputusan utama.

Dominasi maskulinitas dalam narasi poligami digital umumnya ditampilkan melalui citra laki-laki sebagai figur kuat, rasional, dan berwibawa. Laki-laki sering digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki kapasitas moral, ekonomi, dan spiritual untuk menjalankan poligami. Representasi ini menempatkan maskulinitas sebagai standar ideal kepemimpinan keluarga, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri. Bahasa yang digunakan dalam konten poligami kerap menekankan kemampuan laki-laki untuk "mengatur," "mengayomi," dan "berlaku adil," yang secara implisit mengukuhkan superioritas laki-laki dalam struktur keluarga.⁵

Legitimasi otoritas laki-laki dalam narasi poligami juga dibangun melalui pembingkaian normatif yang mengaitkan kekuasaan dengan tanggung jawab. Otoritas laki-laki tidak ditampilkan sebagai dominasi semata, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan demi kesejahteraan keluarga. Dengan cara ini, relasi kuasa yang timpang disamarkan sebagai bentuk kepemimpinan yang sah dan bermoral. Narasi semacam ini membuat posisi laki-laki sebagai pengendali relasi rumah tangga tampak alami dan tidak problematis, sehingga sulit dipertanyakan oleh audiens.

Dalam banyak konten, perempuan digambarkan sebagai subjek yang menerima dan mendukung otoritas laki-laki. Istri-istri dalam narasi poligami sering ditampilkan sebagai sosok yang patuh, sabar, dan ikhlas terhadap keputusan suami. Sikap penerimaan ini bukan hanya direpresentasikan sebagai pilihan personal, tetapi juga sebagai nilai ideal yang patut diteladani. Dengan demikian, media sosial berperan dalam membentuk standar perilaku perempuan yang sesuai dengan

⁵ Muhammad N. Hadi, The Narrative of Protecting Polygamous Women in Indonesia's Digital World: Between Moderate and Conservative Muslims, *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2) (2022), 161–186.

hierarki gender yang telah ditetapkan, sekaligus menekan kemungkinan munculnya suara kritis dari pihak perempuan.

Pembentukan hierarki gender dalam narasi poligami digital juga tampak dari cara pengalaman perempuan diseleksi dan disajikan. Kisah-kisah yang diangkat umumnya adalah pengalaman yang mendukung legitimasi poligami, sementara pengalaman yang menunjukkan penderitaan, konflik, atau ketidakadilan cenderung diabaikan atau dipinggirkan. Proses seleksi ini menciptakan gambaran realitas yang tidak seimbang, di mana relasi kuasa laki-laki diperkuat melalui penghapusan narasi alternatif. Hierarki gender pun direproduksi melalui mekanisme representasi yang tampak netral namun sarat kepentingan.

Selain itu, dominasi maskulinitas juga diperkuat melalui penggunaan simbol dan bahasa religius dalam narasi poligami. Laki-laki sering diposisikan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menafsirkan nilai-nilai normatif, sementara perempuan ditempatkan sebagai penerima tafsir tersebut. Hal ini menciptakan ketimpangan epistemik, di mana pengetahuan dan kebenaran diklaim berada di tangan laki-laki. Media sosial menjadi ruang yang efektif untuk menyebarkan klaim otoritas semacam ini, karena pesan dapat disampaikan secara berulang dan menjangkau audiens yang luas.

Namun demikian, hierarki gender yang dibangun melalui narasi poligami di media sosial tidak sepenuhnya diterima tanpa resistensi. Di tengah dominasi maskulinitas, muncul pula konten yang mempertanyakan legitimasi otoritas laki-laki dan menyoroti ketimpangan yang dialami perempuan. Kritik terhadap poligami sering menyoroti bagaimana konsep keadilan yang diklaim laki-laki dalam praktiknya sulit diwujudkan. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, narasi kritis ini menunjukkan adanya kesadaran yang berkembang di ruang digital tentang perlunya relasi gender yang lebih setara.

Interaksi pengguna dalam kolom komentar memperlihatkan bagaimana dominasi dan resistensi saling berhadapan. Pendukung poligami kerap mempertahankan hierarki gender dengan argumen normatif dan moral, sementara penentangnya menantang klaim otoritas laki-laki melalui pengalaman personal dan kritik sosial. Pertarungan wacana ini menunjukkan bahwa media sosial bukan ruang

yang homogen, melainkan arena dinamis di mana kekuasaan diproduksi, dipertahankan, dan digugat secara simultan.

Secara keseluruhan, narasi poligami di media sosial berperan signifikan dalam membentuk dan mereproduksi dominasi maskulinitas serta hierarki gender di masyarakat. Legitimasi otoritas laki-laki dibangun melalui bahasa, simbol, dan representasi yang tampak wajar dan bermoral, sehingga relasi kuasa yang timpang sulit dikenali sebagai masalah. Namun, keberadaan narasi tandingan menunjukkan bahwa ruang digital juga membuka peluang untuk mempertanyakan dan menegosiasikan ulang struktur gender yang telah mapan. Dengan demikian, media sosial menjadi medan penting dalam memahami bagaimana kekuasaan maskulin dan hierarki gender bekerja dalam diskursus poligami di Indonesia.

Kemunculan Narasi Tandingan, Kritik Publik, dan Wacana Keadilan Gender dalam Interaksi Pengguna Media Sosial terhadap Poligami

Kemunculan narasi tandingan dalam diskursus poligami di media sosial menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya didominasi oleh wacana yang melegitimasi praktik tersebut. Di tengah kuatnya narasi normatif yang menempatkan poligami sebagai praktik sah, bermoral, dan ideal, media sosial juga memfasilitasi hadirnya kritik publik dan wacana keadilan gender yang menantang struktur kekuasaan yang mapan. Narasi tandingan ini menjadi bukti bahwa pengguna media sosial bukan sekadar konsumen pasif, melainkan aktor aktif yang terlibat dalam proses produksi makna dan perlawanan simbolik.⁶

Narasi tandingan terhadap poligami umumnya muncul dari pengalaman personal perempuan, terutama mereka yang pernah atau sedang berada dalam relasi poligami yang problematis. Media sosial memberi ruang bagi pengalaman yang sebelumnya tersembunyi dalam ranah privat untuk diungkapkan secara terbuka. Cerita tentang tekanan emosional, rasa tidak adil, kecemburuan, kehilangan harga diri, hingga dampak terhadap anak menjadi bagian penting dari wacana kritis ini. Dengan membagikan pengalaman tersebut, perempuan tidak

⁶ Siti Satri Wahyuni, Analisis Wacana Kritis pada Komunitas Indonesia Tanpa Poligami (ITAMI) di Instagram, *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2) (2021), 65–71.

hanya mengekspresikan luka personal, tetapi juga membongkar sisi lain dari poligami yang jarang ditampilkan dalam narasi dominan.

Selain pengalaman personal, kritik publik terhadap poligami juga hadir dalam bentuk analisis sosial dan refleksi moral. Pengguna media sosial mempertanyakan klaim keadilan yang sering dijadikan dasar legitimasi poligami, dengan menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Kritik ini menyoroti bagaimana keputusan poligami sering kali bersifat sepihak dan lebih menguntungkan laki-laki, sementara perempuan dihadapkan pada tuntutan untuk menerima dan menyesuaikan diri. Dalam konteks ini, media sosial menjadi ruang diskursif untuk mengungkap ketidakselarasan antara narasi ideal dan realitas praktik.

Wacana keadilan gender dalam diskursus poligami digital juga berkembang melalui penggunaan bahasa yang menekankan kesetaraan, hak, dan martabat perempuan. Pengguna media sosial mulai menggeser fokus pembahasan dari sekadar legalitas atau moralitas normatif menuju pertanyaan tentang dampak sosial dan psikologis poligami. Isu seperti persetujuan yang bebas dari tekanan, distribusi keadilan emosional, serta kesejahteraan perempuan dan anak menjadi topik yang semakin sering diangkat. Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi cara pandang masyarakat terhadap relasi gender dalam rumah tangga.

Interaksi antar pengguna di kolom komentar memperlihatkan bagaimana narasi tandingan dan kritik publik berfungsi sebagai bentuk resistensi kolektif. Kolom komentar tidak hanya menjadi ruang respons spontan, tetapi juga arena dialog, debat, dan solidaritas. Banyak pengguna yang saling menguatkan pengalaman, memberikan dukungan emosional, dan berbagi perspektif kritis. Di sisi lain, kolom komentar juga menjadi tempat terjadinya konflik wacana, di mana pendukung poligami berupaya mempertahankan legitimasi praktik tersebut, sementara kelompok kritis terus mempertanyakan dasar moral dan sosialnya.⁷

Narasi tandingan juga muncul melalui format kreatif khas media sosial, seperti video reaksi, duet, stitch, dan parodi. Melalui format ini, kritik terhadap poligami

⁷ Qorir Yunia Sari, Kampanye Poligami Coach Hafidin dalam Perspektif Feminisme, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 10(3) (2022), 45–59.

disampaikan dengan cara yang lebih komunikatif dan mudah diakses oleh audiens luas. Humor, ironi, dan satire digunakan sebagai strategi untuk membongkar kontradiksi dalam narasi dominan. Pendekatan semacam ini membuat kritik terhadap poligami tidak selalu tampil dalam bentuk serius dan akademis, tetapi justru lebih membumi dan relevan dengan kehidupan sehari-hari pengguna media sosial.

Namun demikian, kemunculan narasi tandingan tidak lepas dari berbagai tantangan. Kritik terhadap poligami sering kali dihadapkan pada serangan balik berupa delegitimasi, pelabelan negatif, dan tekanan moral. Pengguna yang menyuarakan keadilan gender kerap dituduh tidak memahami nilai budaya atau agama, terlalu emosional, atau terpengaruh ideologi tertentu. Bentuk-bentuk penolakan ini menunjukkan bahwa perjuangan wacana di ruang digital juga melibatkan mekanisme kekuasaan yang berupaya membungkam suara kritis.

Meskipun menghadapi resistensi, narasi tandingan tetap memainkan peran penting dalam memperluas spektrum diskursus poligami. Kehadiran kritik publik memaksa audiens untuk melihat poligami dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari perspektif yang menguntungkan pihak dominan. Proses ini menciptakan ruang refleksi kolektif, di mana nilai-nilai sosial yang selama ini dianggap mapan mulai dipertanyakan. Media sosial, dengan sifatnya yang partisipatif, memungkinkan terjadinya pergeseran makna secara gradual melalui interaksi yang berulang.

Wacana keadilan gender yang berkembang dalam diskursus poligami digital juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran sosial yang lebih luas. Isu poligami tidak lagi dipandang sebagai urusan privat semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan relasi kuasa dan hak asasi. Dengan demikian, kritik terhadap poligami menjadi bagian dari diskursus yang lebih besar tentang posisi perempuan dalam masyarakat dan perlunya relasi yang lebih setara dalam institusi keluarga.⁸

⁸ Rizki A. Kurniansyah, Pembingkaihan Media Dalam Berita Pergub Poligami ASN di Provinsi Banten, *Senakom: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 3(1) (2025), 1–10.

Secara keseluruhan, kemunculan narasi tandingan, kritik publik, dan wacana keadilan gender dalam interaksi pengguna media sosial menunjukkan bahwa ruang digital merupakan medan kontestasi makna yang dinamis. Media sosial tidak hanya mereproduksi dominasi, tetapi juga membuka peluang bagi resistensi dan transformasi sosial. Diskursus poligami di ruang digital memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat digugat melalui bahasa, pengalaman, dan solidaritas kolektif. Dengan demikian, media sosial berperan sebagai ruang penting dalam proses negosiasi nilai, di mana praktik sosial seperti poligami terus diperdebatkan, ditafsirkan ulang, dan dikritisi dalam kerangka keadilan gender.

Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital dalam Proses Normalisasi, Kontestasi Makna, dan Negosiasi Kekuasaan atas Praktik Poligami

Media sosial telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan praktik sosial, termasuk poligami, dibicarakan secara terbuka dan meluas. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena sosial tempat nilai, norma, dan relasi kekuasaan diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertarungkan. Praktik poligami yang sebelumnya cenderung berada dalam ranah privat kini menjadi konsumsi publik melalui berbagai platform digital, sehingga membuka ruang bagi proses normalisasi, kontestasi makna, dan negosiasi kekuasaan yang kompleks.

Proses normalisasi poligami di media sosial berlangsung melalui pengulangan narasi, visualisasi yang selektif, dan pembingkaian yang menekankan aspek positif dari praktik tersebut. Konten yang menampilkan keharmonisan keluarga, keberhasilan ekonomi, dan stabilitas emosional digunakan untuk membangun citra poligami sebagai praktik yang wajar dan dapat diterima. Melalui mekanisme ini, media sosial berperan dalam menggeser batas antara yang dianggap tabu dan yang dianggap normal. Paparan berulang terhadap konten semacam ini berpotensi membentuk persepsi publik bahwa poligami merupakan bagian sah dari kehidupan sosial, terlepas dari kompleksitas dan kontroversi yang menyertainya.⁹

⁹ Chintya Febrindasari, Aspek Linguistik dalam Wacana Persuasif Poligami di Media Sosial, *Kolita: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 19(1) (2024), 45–60

Namun, media sosial sebagai ruang publik digital juga membuka ruang bagi kontestasi makna. Narasi dominan yang menormalisasi poligami tidak berdiri tanpa tantangan. Pengguna media sosial dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam menghadirkan interpretasi alternatif yang mempertanyakan legitimasi praktik tersebut. Kontestasi ini terlihat jelas dalam perdebatan di kolom komentar, video respons, serta diskusi daring yang mempertemukan berbagai sudut pandang. Dalam proses ini, makna poligami tidak bersifat statis, melainkan terus diperdebatkan dan didefinisikan ulang oleh para aktor yang terlibat.

Negosiasi kekuasaan menjadi aspek penting dalam diskursus poligami di media sosial. Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga didistribusikan melalui interaksi digital. Pembuat konten, figur publik, dan akun dengan jumlah pengikut besar memiliki posisi strategis dalam membentuk narasi dan memengaruhi opini publik. Namun, audiens juga memiliki daya untuk merespons, mengkritik, atau bahkan menolak narasi yang disampaikan. Melalui fitur komentar, berbagi ulang, dan reaksi, pengguna media sosial berpartisipasi aktif dalam menentukan wacana mana yang memperoleh legitimasi dan mana yang dipinggirkan.

Media sosial juga memfasilitasi terjadinya negosiasi antara nilai tradisional dan tuntutan perubahan sosial. Di satu sisi, poligami dipertahankan melalui narasi yang menekankan kesesuaian dengan nilai budaya dan norma yang telah lama ada. Di sisi lain, muncul tuntutan untuk menilai praktik tersebut dari perspektif keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan perempuan. Negosiasi ini mencerminkan dinamika masyarakat Indonesia yang berada di persimpangan antara mempertahankan tradisi dan merespons perubahan sosial yang semakin cepat akibat globalisasi dan perkembangan teknologi.¹⁰

Ruang publik digital memungkinkan suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan untuk memperoleh visibilitas. Perempuan dan kelompok yang kritis terhadap poligami memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan pengalaman

¹⁰ Putri A. Wulandari, Representasi Perempuan dan Relasi Kuasa dalam Video YouTube Narasi Newsroom, *JP-BSI: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2) (2023), 123–135.

dan pandangan mereka. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai sarana demokratisasi wacana, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari ketimpangan kekuasaan. Algoritma platform, popularitas akun, dan preferensi audiens tetap memengaruhi sejauh mana suatu narasi dapat menjangkau publik yang lebih luas.

Proses normalisasi dan kontestasi makna poligami di media sosial juga dipengaruhi oleh karakteristik teknologis platform digital. Format konten yang singkat, visual, dan emosional cenderung menyederhanakan isu yang kompleks. Akibatnya, diskursus poligami sering kali terjebak dalam polarisasi antara pendukung dan penentang, tanpa ruang yang cukup untuk dialog yang mendalam. Meskipun demikian, sifat partisipatif media sosial tetap membuka peluang bagi terjadinya refleksi kolektif melalui interaksi yang berulang.

Dalam ruang publik digital, praktik poligami tidak hanya dinilai dari aspek legal atau moral, tetapi juga dari cara ia direpresentasikan dan diperdebatkan. Media sosial menjadi medan simbolik di mana identitas, nilai, dan relasi kuasa dipertarungkan. Proses ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam masyarakat tidak bersifat monolitik, melainkan terus bergerak dan berubah seiring dengan dinamika komunikasi digital. Poligami, sebagai praktik sosial, menjadi contoh bagaimana isu privat dapat berubah menjadi persoalan publik melalui mediasi teknologi.

Secara keseluruhan, media sosial sebagai ruang publik digital memainkan peran penting dalam membentuk cara masyarakat memahami dan merespons praktik poligami. Melalui proses normalisasi, kontestasi makna, dan negosiasi kekuasaan, media sosial tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga turut membentuknya. Diskursus poligami di ruang digital memperlihatkan kompleksitas relasi antara teknologi, budaya, dan kekuasaan, serta menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat terjadi melalui interaksi simbolik yang berlangsung secara terus-menerus di media sosial.¹¹

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa diskursus poligami di media sosial Indonesia merepresentasikan dinamika relasi gender dan kekuasaan yang bersifat

¹¹ Raden Adfira, Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender, *Mizan: Jurnal Ilmiah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.*(2023)

ambivalen, di mana legitimasi otoritas laki-laki dan hierarki patriarkal direproduksi melalui narasi normatif sekaligus dipertanyakan melalui narasi tandingan berbasis pengalaman dan wacana keadilan gender. Temuan menunjukkan bahwa karakteristik algoritmik dan interaktif platform digital berperan dalam memperkuat normalisasi maupun membuka ruang kontestasi makna, sehingga media sosial berfungsi sebagai arena publik yang aktif membentuk persepsi sosial terhadap praktik poligami. Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi perspektif gender kritis dan pendekatan sosio-digital dalam membaca praktik poligami sebagai konstruksi diskursif lintas platform, bukan semata fenomena domestik. Namun, keterbatasan penelitian pada analisis konten publik tanpa wawancara mendalam membuka peluang bagi riset lanjutan untuk mengkaji pengalaman subjek secara langsung atau membandingkan dinamika lintas budaya dan lintas negara. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas metode dengan pendekatan campuran (mixed methods) serta melibatkan analisis kebijakan komunikasi digital guna memperkuat implikasi praktis dalam pengarusutamaan kesetaraan gender di ruang publik daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Adfira, R. Trend poligami di media sosial perspektif kesetaraan gender. *Mizan: Jurnal Ilmiah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor*. (2023).
- Ansori, A. The contestation of the family law discourse in the digital age: Islam, state, and gender. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2). (2022).
- Febrindasari, C. Aspek linguistik dalam wacana persuasif poligami di media sosial. *Kolita: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 19(1). (2024).
- Hadi, M. N. The narrative of protecting polygamous women in Indonesia's digital world: Between moderate and conservative Muslims. *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2). (2022).
- Ilhami, M. Analisis semiotika propaganda poligami di media sosial: Studi kasus akun Instagram @coach.hafidin. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 8(2). (2023).
- Kurniansyah, R. A. Pembingkaian media dalam berita pergub poligami ASN di Provinsi Banten. *Senakom: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 3(1). (2025).

- Muliawati, D. Gender politis dan konteks ekonomi media dalam tayangan film. *Interaksi Online: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 12(2). (2024).
- Sari, Q. Y. Kampanye poligami Coach Hafidin dalam perspektif feminism. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 10(3). (2022).
- Syahputra, A. Representasi poligami dalam film *Bismillah Kunikahi Suamimu* karya Vyntiana Itari. *Qisthosia: Jurnal Studi Islam*, 8(1). (2024).
- Suryandari, N., & Yuliastina, R. Komunikasi perempuan dalam keluarga berpoligami di Madura. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1). (2025).
- Wahyuni, S. S. Analisis wacana kritis pada komunitas Indonesia Tanpa Poligami (ITAMI) di Instagram. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2). (2021).
- Wahyuni, T. S., & Zumiarti. Analisis wacana kritis pada komunitas Indonesia Tanpa Poligami (ITAMI) di Instagram. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2). (2021).
- Wulandari, P. A. Representasi perempuan dan relasi kuasa dalam video YouTube Narasi Newsroom. *JP-BSI: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2). (2023).
- Yazid, M. Indonesian YouTube preachers' legal opinion on polygamy. *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1). (2020).
- Zahra, F. Representasi poligami dalam video dokumenter VICE Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1). (2023).